



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kasus Dana BK DPPKAD, Konsultasi ke Kemendagri

RBI, BENGKULU - Untuk menyeret orang yang harus bertanggung jawab dalam perkara dugaan praktik korupsi dana Beban Kerja (BK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bengkulu tahun 2015 sepertinya molor. Sebab seusai tim Penyidik Kejaksaaan Negeri (Kejari) Bengkulu, memperoleh hasil kerugian negara dari BPK namun belum membuat penyidik Kejari Bengkulu, menentukan sikap tindak lanjut terhadap perkara tersebut.

Diketahui sekarang ini tim Penyidik Kejari masih mau berkoordinasi dengan pihak Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan besaran pen-

gucuran dana BK tersebut. Guna untuk mencari barang bukti tambahan berupa Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur masalah pembayaran dana BK itu.

"Sebelum menentukan sikap lanjutan dalam perkara ini kita masih mau berkoordinasi dengan Kemendagri. Untuk mempertanyakan masalah aturan pembayaran dana BK tersebut, dan saksi ahli," ucap Kajari Bengkulu, I Made Sudarmawan SH, MH melalui Kasi Pidsus Oktalian SH kemarin.

Sebelumnya, Oktalian juga mengungkapkan bahwa dalam perkara itu bakal menyeret nama pejabat Kota Bengkulu. Namun untuk kepastian nama pejabat iru, hingga saat ini belum dapat dipasti-

kan keterlibatannya. Hanya saja kuat dugaan ada nama pejabat yang terseret. Untuk membuktikan itu, pihaknya cukup dengan bukti hasil audit kerugian negara dari BPKP.

Diakuinya, dalam penanganan perkara ini masih ada kendala, selain dari koordinasi dengan Kemendagri pihaknya juga membutuhkan saksi ahli dalam perkara tersebut. Selain dari itu ia juga mengungkapkan, bahwa penghitungan kerugian negara dalam perkara ini sudah dinyatakan selesai.

"Sebelumnya Pak Kajari juga pernah mengatakan, tidak jauh dari hasil audit penyidik yaitu Rp 1,4 Miliar. Tetapi nantilah kita lihat, berapa kerugian negara dari

BPK. Karena sekarang ini kita belum menerima berkas itu dari BPK," imbuhnya. Untuk diketahui, pembayaran tunjangan dana BK tahun 2015 diduga menyalahi aturan perwal nomor 36. Sesuai dengan perwal nomor 12 tahun 2014 jabatan Kadis mendapatkan tunjangan dana BK Rp 6,5 juta, kemudian pada Perwal Nomor 36 tahun 2015 menjadi Rp 12 juta, Jabatan sekretaris dan Kabid pada tahun 2014 mendapatkan tunjangan dana BK Rp 5 juta, di tahun 2015 menjadi Rp 9 juta. Jabatan Kasi tahun 2014 mendapat tunjangan dana BK Rp 3 juta ditahun 2015 mendapat Rp 5 juta. Jabatan bendahara ditahun 2014 menerima dana BK Rp 3 juta ditahun 2015 menjadi Rp 4,5 juta. Staf

ASN tahun 2014 menerima dana BK Rp 1,5 juta, ditahun 2015 Rp 3,5 juta, dan honorer pada tahun 2014 menerima dana BK Rp 1 juta ditahun 2015 mendapatkan Rp 3 juta. Dana BK yang harus dikembalikan ASN dan honorer yang merenerima dana BK itu adalah selisih kenaikan tunjangan dana BK dari tahun 2014 ke tahun 2015. Pembayaran hanya berlangsung dua bulan, tetapi di dalam tanda-tangan penerimaan, ASN dan honorer tersebut harus tanda-tangan menerima tunjangan selama 7 bulan. Total semua anggaran Rp 1,8 Miliar Rp 200 juta digunakan untuk membayar dana BK. Sesuai dengan penjelasan M Sofyan mantan kepala DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015. (ide)